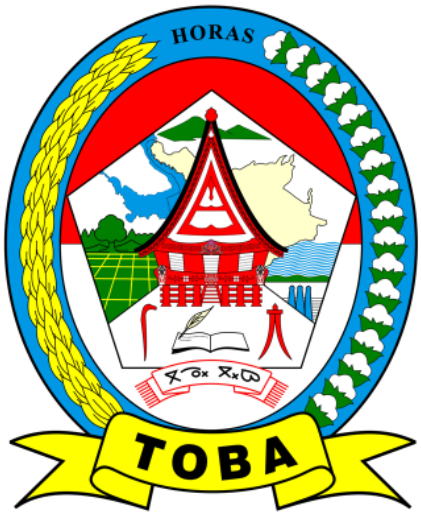



# PERUBAHAN RENCANA KERJA

# (P-RENJA)

## KECAMATAN BORBOR

## KABUPATEN TOBA

## TAHUN 2025

SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 441 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA
TAHUN 2025

BUPATI TOBA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Inspektorat;
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
9. Dinas Lingkungan Hidup;
10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pertanian;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
27. Kecamatan Ajibata;
28. Kecamatan Bonatua Lunasi;

Dipindai dengan CamScanner

29. Kecamatan Borbor;
30. Kecamatan Habinsaran;
31. Kecamatan Laguboti;
32. Kecamatan Lumban Julu;
33. Kecamatan Parmaksian;
34. Kecamatan Porsea;
35. Kecamatan Siantar Narumonda;
36. Kecamatan Silaen;
37. Kecamatan Tampahan;
38. Kecamatan Uluan;
39. Kecamatan Nassau;
40. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
41. Kecamatan Sigumpar

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Tahapan Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk memastikan telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB.TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
b.Kepala Bagian Hukum

LUSIANA JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. PJ750804 200502 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Dipindai dengan CamScanner

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI ..... i

**BAB I. PENDAHULUAN..... 1**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 1

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4. Sistematika Penulisan ..... 6

**BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ..... 6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Borbor Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 ..... 7

**BAB III. RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..... 17**

**BAB IV. PENUTUP ..... 20**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perobahan. Selanjutnya Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana –rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja PD ini disusun dengan maksud menyediakan sebuah Dokumen Perencanaan Konfrehensif yang akan digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan P-RENJA PD)

Adapun yang menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Renja PD ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya kesinerjian Kebijakan dan Sinkronisasi Program secara Vertikal antar tingkat Pemerintahan.

Oleh sebab itu bahwa P-Renja PD ini tidak terlepas dan bahkan merupakan tindak lanjut pengejawantahan dari Visi-Misi Bupati Terpilih Tahun 2025 yang disampaikan kepada Masyarakat melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Toba, yang sudah barang tentu menjadi acuan bagi kami Perangkat daerah di Kecamatan untuk membuat tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Dapat kami tambahkan bahwa P-Renja PD ini adalah hasil Kesepakatan/Perumusan dengan berbagai stoke Holder/Pelaku Pembangunan di Kecamatan Borbor dan dari Isu-isu yang berkembang dengan tetap memperhatikan dan mempedomani kebijakan dan program Strategis Kabupaten Toba.

## 1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan RENJA Kecamatan Borbor ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruan;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RENJA Kecamatan Borbor Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kecamatan Borbor yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu strategis yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Borbor.

Berdasarkan Pertimbangan ini, maka Perubahan RENJA Kecamatan Borbor ini disusun dengan maksud:

1. Memberikan arah dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Borbor untuk mewujudkan dan mendukung Visi-Misi Kabupaten Toba Tahun 2020.
2. Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Borbor dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun, Perubahan RENJA PD ini bertujuan sebagai penyelaras, Panduan, Pedoman sekaligus merupakan tolak ukur untuk menentukan Tingkat Keberhasilan dalam pelaksanaan Tugas Perangkat daerah Kecamatan Borbor

## 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV. PENUTUP**

# BAB II

# EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Borbor Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Kecamatan Borbor sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dituangkan dalam tabel berikut Ini :

A. Indikator Kinerja Utama

| No | IKU Perangkat Daerah | Target 2025 | Realisasi Sampai Tw. II | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 76.60 | 56,13 | |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah | 74,50 | 74,50 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH | 100 | 50 | |
| 4 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | 100 | 50 | |
| 5 | Meningkatnya pembinaan pemerintah desa | 100 | 50 | |

B. Indikator Kinerja Sasaran

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Target 2025 | Realisasi Sampai Tw. II | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Evaluasi Internal AKIP | 74,50 | 74,50 | |
| 2. | Kesesuaian layanan dengan SOP | 100 | 50 | |
| 3. | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | 100 | 50 | |
| 4. | Tingkat Pembinaan Desa | 100 | 50 | |

C. Indikator Kinerja Program

| No | Indikator Kinerja Program | Target 2025 | Realisasi Sampai Tw. II | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah | 100 | 54,28 | |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH | 100 | 50 | |

| No | Indikator Kinerja Program | Target 2025 | Realisasi Sampai Tw. II | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | 100 | 50 | |
| 4. | Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan | 100 | 50 | |
| 5. | Meningkatnya pembinaan desa | 100 | 50 | |

Untuk lebih jelasnya, analisis keberhasilan kinerja program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.29 sebagai berikut :

**LAMPIRAN II**

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2025
## Kabupaten Toba

| Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (*Outcomes*), Kegiatan (*Output*), Sub Kegiatan (*Output*) | Satuan Indikator | Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode | | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 | | Target dan Realisasi Kinejra Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | | | | | | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 | | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 | | Tingkat Realisasi (%) TW.II | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 | | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = (8/7) | | 10 = (6+8) | | 11 = (10/5) | |
| | | | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| **G. URUSAN KEWILAYAHAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KECAMATAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **30.Kecamatan Borbor** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **01** | **02** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan** | **%** | **100,00** | **588.200.000,00** | **50,00** | **163.150.410,00** | **100,00** | **115.000.000,00** | **50,00** | **14.355.000,00** | **50,00%** | **12,48%** | **20,00** | **177.505.410,00** | **20,00%** | **30,18%** |
| 7 | 01 | 02 | 2.01 | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100,00 | 480.000.000,00 | 100,00 | 163.150.410,00 | 100,00 | 115.000.000,00 | 50,00 | 14.355.000,00 | 50,00% | 12,48% | 150,00 | 177.505.410,00 | 150,00% | 36,98% |
| **7** | **01** | **03** | | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **%** | **100,00** | **285.859.629,00** | **50,00** | **49.700.300,00** | **100,00** | **70.000.000,00** | **50,00** | **2.441.500,00** | **50,00%** | **3,49%** | **20,00** | **52.141.800,00** | **20,00%** | **18,24%** |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Presentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang dilakukan | % | 100,00 | 285.859.629,00 | 50,00 | 49.700.300,00 | 100,00 | 70.000.000,00 | 50,00 | 2.441.500,00 | 50,00% | 3,49% | 100,00 | 52.141.800,00 | 100,00% | 18,24% |
| **7** | **01** | **05** | | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum** | **%** | **100,00** | **100.000.000,00** | **100,00** | **39.184.000,00** | **100,00** | **22.000.000,00** | **50,00** | **6.400.000,00** | **50,00%** | **29,09%** | **30,00** | **45.584.000,00** | **30,00%** | **45,58%** |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan | Kegiatan | 6,00 | 100.000.000,00 | 1,00 | 39.184.000,00 | 1,00 | 22.000.000,00 | 0,50 | 6.400.000,00 | 50,00% | 29,09% | 1,50 | 45.584.000,00 | 25,00% | 45,58% |
| **7** | **01** | **06** | | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA** | **Persen Desa/ Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Desa** | **%** | **100,00** | **95.415.330,00** | **100,00** | **41.205.000,00** | **100,00** | **103.500.000,00** | **50,00** | **3.600.000,00** | **50,00%** | **3,48%** | **30,00** | **44.805.000,00** | **30,00%** | **46,96%** |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi | Desa | 15,00 | 95.415.330,00 | 15,00 | 41.205.000,00 | 15,00 | 103.500.000,00 | 7,50 | 3.600.000,00 | 50,00% | 3,48% | 22,50 | 44.805.000,00 | 150,00% | 46,96% |
| **7** | **01** | **01** | | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah** | **%** | **100,00** | **9.001.427.560,00** | **59,78** | **4.796.000.887,00** | **100,00** | **1.913.549.000,00** | **54,28** | **829.386.879,00** | **57,62%** | **43,34%** | **22,81** | **5.625.387.766,00** | **22,81%** | **62,49%** |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah | % | 100,00 | 53.339.560,00 | 100,00 | 19.776.173,00 | 100,00 | 11.000.000,00 | 71,41 | 2.310.000,00 | 71,41% | 21,00% | 34,28 | 22.086.173,00 | 34,28% | 41,41% |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi keuangan | % | 100,00 | 7.230.000.000,00 | 100,00 | 4.058.247.114,00 | 100,00 | 1.528.049.000,00 | 50,00 | 764.531.879,00 | 50,00% | 50,03% | 30,00 | 4.822.778.993,00 | 30,00% | 66,71% |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum | % | 100,00 | 816.188.000,00 | 100,00 | 276.313.056,00 | 100,00 | 157.500.000,00 | 50,00 | 25.220.000,00 | 50,00% | 16,01% | 30,00 | 301.533.056,00 | 30,00% | 36,94% |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jasa Penunjang Kinerja Aparatur | % | 100,00 | 404.400.000,00 | 100,00 | 280.216.301,00 | 100,00 | 107.000.000,00 | 50,00 | 32.175.000,00 | 50,00% | 30,07% | 30,00 | 312.391.301,00 | 30,00% | 77,25% |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Barang Milik Daerah yang Terpelihara | % | 75,00 | 497.500.000,00 | 72,00 | 161.448.243,00 | 75,00 | 110.000.000,00 | 50,00 | 5.150.000,00 | 66,67% | 4,68% | 24,40 | 166.598.243,00 | 32,53% | 33,49% |
| | | **TOTAL** | | | | | | | | **10.070.902.519,00** | | | | **2.224.049.000,00** | **50,86** | **856.183.379,00** | **51,52%** | **18,38%** | | **5.945.423.976,00** | **24,56%** | **40,69%** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 = (8/7) | | 10 = (6+8) | | 11 = (10/5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| G. URUSAN KEWILAYAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KECAMATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BAB III

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menerangkan rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, sasaran daerah, dan pendanaan indikatif. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Borbor sangat diperlukan untuk mengetahui apakah realisasi hasil program dan keluaran kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil kegiatan yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu dapat diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat Daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Borbor. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan.

Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi rencana perubahan program/kegiatan akan ditabulasi dalam **Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025** yang memuat target capaian kinerja, lokasi, kebutuhan dana yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Tujuan

| No | Uraian | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 76,60 | |

2. Sasaran

| No | Uraian | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah | 74,50 | |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH | 100 | |
| 3 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | 100 | |
| 4 | Meningkatnya pembinaan pemerintah desa | 100 | |

3. Program

| No | Uraian | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 74,50 | |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 | |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | |
| 4 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100 | |
| 5 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | |

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Uraian | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | 76,60 | |
| 2 | Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah | 74,50 | |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH | 100 | |
| 4 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat | 100 | |
| 5 | Meningkatnya pembinaan pemerintah desa | 100 | |

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

   Untuk Perangkat Daerah Kecamatan tidak mempunyai Indikator Kinerja Kunci (IKK).

| No | Uraian | Target | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Nihil | | |

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. TOBA
# TAHUN 2025

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **KECAMATAN BORBOR** | | | | | | | **2.342.049.000,00** | **2.114.821.884,00** | **2.069.328.944,00** | **-272.720.056,00** | | | | | | | **2.246.746.060,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.342.049.000,00** | **2.114.821.884,00** | **2.069.328.944,00** | **-272.720.056,00** | | | | | | | **2.246.746.060,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.342.049.000,00** | **2.114.821.884,00** | **2.069.328.944,00** | **-272.720.056,00** | | | | | | | **2.246.746.060,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **1.928.549.000,00** | **2.012.972.984,00** | **1.982.306.394,00** | **-44.151.440,00** | | | | | | | **1.884.397.560,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase capaian kinerja perangkat daerah* | | | | 100 persen | 100 persen | 11.000.000,00 | 4.779.000,00 | 2.628.000,00 | -8.372.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan | | 11.547.560,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.500.000,00 | 2.276.000,00 | 1.239.000,00 | -2.261.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 3.850.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 7.500.000,00 | 2.503.000,00 | 1.389.000,00 | -6.111.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 7.697.560,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan layanan administrasi keuangan* | | | | 100 %<br>100 persen | 100 %<br>100 persen | 1.528.049.000,00 | 1.760.756.544,00 | 1.760.756.544,00 | 232.707.544,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatus Kecamatan | | 1.480.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.528.049.000,00 | 1.760.756.544,00 | 1.760.756.544,00 | 232.707.544,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 1.480.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan layanan administrasi kepegawaian Cakupan layanan administrasi umum* | | | | 100 %<br>100 persen | 100 %<br>100 persen | 157.500.000,00 | 76.856.940,00 | 48.341.350,00 | -109.158.650,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatus Kecamatan | | 184.850.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 50.000.000,00 | 10.136.140,00 | 6.890.710,00 | -43.109.290,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 15.500.000,00 | 8.232.800,00 | 5.558.640,00 | -9.941.360,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 1.850.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 72.500.000,00 | 58.488.000,00 | 35.892.000,00 | -36.608.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 108.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatus Kecamatan | | 0,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik<br>4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 0,00 | KECAMATAN BORBOR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 107.000.000,00 | 106.920.000,00 | 106.920.000,00 | -80.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Aparatus Kecamatan | | 138.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 92.000.000,00 | 91.920.000,00 | 91.920.000,00 | -80.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 123.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 110.000.000,00 | 63.660.500,00 | 63.660.500,00 | -46.339.500,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Kecamatan | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 60.000.000,00 | 54.114.600,00 | 54.114.600,00 | -5.885.400,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 10.000.000,00 | 5.720.000,00 | 5.720.000,00 | -4.280.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 40.000.000,00 | 3.825.900,00 | 3.825.900,00 | -36.174.100,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 0,00 | KECAMATAN BORBOR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **218.000.000,00** | **51.599.000,00** | **51.003.650,00** | **15.200.000,00** | | | | | | | **233.200.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase jumlah kegiatan pemerintahan di kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 115.000.000,00 | 51.599.000,00 | 51.003.650,00 | -63.996.350,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan | | 130.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 65.000.000,00 | 51.599.000,00 | 51.003.650,00 | -13.996.350,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 80.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 50.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -81.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan | | 81.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 81.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -81.000.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 81.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | - | | | | - | - | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan | | 22.200.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.02.2.03.0002 | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 22.200.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Cakupan Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **70.000.000,00** | **16.649.900,00** | **9.570.900,00** | **0,00** | | | | | | | **70.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase jumlah kegiatan pemerdayaan di desa* | | | | 100 persen | 100 persen | 70.000.000,00 | 16.649.900,00 | 9.570.900,00 | -60.429.100,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Desa | | 70.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2025 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2025 | APBD 2025 | RKPD PERUBAHAN 2025 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 55.000.000,00 | 16.649.900,00 | 9.570.900,00 | -45.429.100,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persen desa/kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **22.000.000,00** | **19.200.000,00** | **19.200.000,00** | **-2.000.000,00** | | | | | | | **20.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan* | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 22.000.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | -2.800.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Masyarakat Kecamatan | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.000.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persen desa tertib administrasi Pemerintahan desa** | | | | **100 Persen** | **100 Persen** | **103.500.000,00** | **14.400.000,00** | **7.248.000,00** | **-64.351.500,00** | | | | | | | **39.148.500,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi<br><br>Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi* | | | | 15 desa | 15 desa | 103.500.000,00 | 14.400.000,00 | 7.248.000,00 | -96.252.000,00 | | | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | Pemerintah Desa | | 39.148.500,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan<br><br>Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.500.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 22.500.000,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 81.000.000,00 | 14.400.000,00 | 7.248.000,00 | -73.752.000,00 | Kab. Toba, Borbor, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL | - | 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik 4. Peningkatan tat kelola pemerintahan dan pelayanan publik | | | 16.648.500,00 | KECAMATAN BORBOR |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **2.342.049.000,00** | **2.114.821.884,00** | **2.069.328.944,00** | **-184.932.324.681,00** | | | | | | | **2.246.746.060,00** | |

## BAB IV

## PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Borbor,  Juni 2025

CAMAT BORBOR

JAMES PASARIBU, SAP
NIP. 19710125 200212 1 002